

**PERAN LPMK DALAM MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRATIS
MASYARAKAT KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN
BANJARSARI KOTAMADYA SURAKARTA
TAHUN 2018**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi
Strata 1 pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Oleh:

OKTA ISKANDAR
A220120022

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN LPMK DALAM MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRATIS MASYARAKAT
KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI
KOTAMADYA SURAKARTA TAHUN 2018**

PUBLIKASI ILMIAH

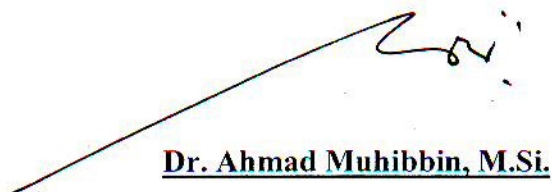
Oleh:

OKTA ISKANDAR

A220120022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si.

NIK. 411

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN LPMK DALAM MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRATIS MASYARAKAT KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI KOTAMADYA SURAKARTA TAHUN 2018

Oleh:

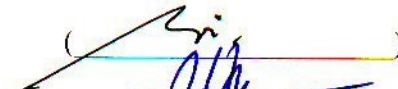


OKTA ISKANDAR

A220120022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 22 Oktober 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Bambang Yulianto Setyadi, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Sundari, SH., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan,



Prof. Dr. Harun Djoko Prayitno, M.Hum.
NIP. 196504281993031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



OKTA ISKANDAR
A220120022

**PERAN LPMK DALAM MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRATIS MASYARAKAT
KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI
KOTAMADYA SURAKARTA TAHUN 2018**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran LPMK, kendala dan solusi yang dilakukan guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018. Subjek dalam penelitian yaitu Kepala Kelurahan, Ketua LPMK, Sekertaris Kelurahan, dan masyarakat di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interaktif yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu sumber data dan metode atau teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018, meliputi LPMK memberikan kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat, LPMK menghormati perbedaan pendapat, LPMK mampu memahami keanekaragaman dalam masyarakat, LPMK sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan, dan LPMK berperan sebagai lembaga yang senantiasa menghimbau masyarakat agar saling menghargai.' 2) Kendala yang dialami oleh LPMK, yaitu kinerja pemerintahan desa yang kurang terbuka terhadap LPMK, masyarakat yang berpendidikan rendah, kurangnya partisipasi dari masyarakat di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta, kurangnya pemahaman dari pemerintah atas kedudukan LPMK di Kelurahan, dan kesibukan anggota LPMK diluar aktivitasnya sebagai anggota LPMK.' 3) Solusi yang dilakukan guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh LPMK, yaitu mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah kelurahan, memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam setiap program pemerintah kelurahan, melakukan diskusi atau pertemuan rutin dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kelurahan, dan mengubah jadwal pertemuan

Kata kunci: peran, LPMK, demokratis, masyarakat

Abstract

This study aims to describe the role of LPMK, constraints and solutions made to overcome the obstacles faced by the LPMK in improving the democratic attitude of the community in Gilingan Village, Banjarsari District, Surakarta Municipality in 2018. This type of research is a qualitative descriptive study. The data in this study are the role of LPMK in improving the democratic attitude of the community in Gilingan Village, Banjarsari District, Surakarta Municipality in 2018. The subjects in the study were the Village Head, the Head of the LPMK, the Regional Secretary, and

the community in Gilingan Village, Banjarsari District, Surakarta Municipality. Data collection techniques in this study are interactive which includes interviews, observation, and documentation. Data validity techniques in this study use two types of triangulation, is of data sources and of methods or data collection techniques. Data analysis techniques in this study use interactive models. The results showed that: 1) The role of the LPMK in improving the democratic attitude of the community in Gilingan Village, Banjarsari Sub-district, Surakarta Municipality in 2018, including the LPMK giving the community freedom to express opinions, LPMK respecting differences of opinion, LPMK able to understand diversity in society, LPMK as an institution that upholds the value and dignity of humanity, and LPMK acts as an institution that always calls on people to respect each other.' 2) Obstacles experienced by the LPMK, namely the performance of the village administration that is less open to the LPMK, the less educated people, the lack of participation from the community in Gilingan Village, Banjarsari Subdistrict, Surakarta Municipality, the lack of understanding from the government over the position of the LPMK in the Village, and the busyness of LPMK members outside his activities as a member of the LPMK.' 3) Solutions to overcome the obstacles faced by the LPMK, namely holding coordination meetings with the village government, appealing to the community about the importance of their participation in each village government program, conducting discussions or regular meetings with RTs, RWs, and community leaders, conduct coordination meetings with the village government, and change the meeting schedule

Keywords: role, LPMK, democratic, society

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan, disebutkan bahwa adanya wadah partisipasi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kelurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Kelurahan, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan. Musyawarah

Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemerintah Kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Hasil Musyawarah Kelurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pemerintah Kelurahan dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Kelurahan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Hasil pengembangan pada kenyataannya, proses demokratisasi yang selama ini hampir tidak pernah ada, pada era otonomi daerah ingin dikembangkan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang lebih demokratis lagi dimana setiap orang akan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama. Sistem demokrasi di kelurahan sekarang ini kurangnya baik. Hal ini dikarenakan, Pemerintahan Kelurahan menempatkan kedudukan seorang kepala kelurahan yang begitu kuat dengan jabatannya di hampir semua lembaga kelurahan, seperti ketua umum LMD dan ketua LKMD, sehingga pusat kekuasaan terkesan hanya berada pada satu tangan yaitu kepala kelurahan. Memang ada keuntungan yaitu kepala kelurahan mampu menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis. Konflik hampir tidak pernah terjadi. Sering dengan terjadinya reformasi, akhirnya disadari bahwa selama ini masyarakat telah kehilangan suatu momentum demokrasi.

Hal ini pula yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, masyarakat terkesan enggan dalam berpartisipasi aktif dalam memberikan ide-ide, gagasan pemikiran kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Masyarakat di Kelurahan Gilingan menganggap bahwa pembangunan pemerintahan kelurahan merupakan urusan pejabat-pejabat yang duduk di jajaran pemerintahan Kelurahan. Adapun masyarakat tidak terlalu memusingkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan program pembangunan di kelurahan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan kelurahan menjadikan pihak LPMK sebagai salah satu lembaga yang mampu mewakili aspirasi

masyarakat setempat memberikan harus memberikan perhatian guna menumbuhkan kembali rasa percaya diri pada masyarakat agar berani dan lebih peduli terhadap segala bentuk program kesejahteraan bagi masyarakat.

LPMK memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan. Hal itu merupakan hasil dari keberadaan anggota LPMK yang dipilih oleh rakyat kelurahan yang memenuhi syarat, dan diharapkan anggota LPMK dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi LPMK dalam pengembangan demokrasi dan otonomi di tingkat kelurahan, maka anggota LPMK hendaknya merupakan figur yang berkualitas, serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan benar sesuai dengan yang diamanahkan oleh masyarakat.

Selanjutnya, dari hal di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan tertarik untuk mengadakan penelitian tentang peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat. Hal ini dikarenakan memiliki hubungan erat dengan kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Pemerintahan Daerah. Kajian mengenai peran LPMK juga terkait erat dengan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), baik di SMP maupun SMA. Untuk Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (SD) PKn di SMP yang disajikan pada Kelas VIII dan IX semester 1 dan 2. Sedangkan untuk Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) PKn di SMA atau SLTA lainnya disajikan pada Kelas XI Semester 1 dan 2 sebagai berikut yaitu menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani (SK). Kompetensi Dasar (KD) meliputi: mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi; mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri masyarakat madani; menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak mulai Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi; menampilkan pemilihan umum sebagai sarana demokrasi; menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari (Budiyono, 2007: 31-60).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran LPMK Dalam Meningkatkan

Sikap Demokratis Masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran LPMK, kendala, dan solusi yang dilakukan guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Dantes (2012: 51), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan fenomena/peristiwa secara terperinci sesuai dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya menurut Lusi dan Nggili (2013: 43), penelitian kualitatif merupakan suatu metode riset (*research*) yang bersifat deskriptif dan lebih menonjolkan pada penggunaan analisis pendekatan induktif dalam penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal terpancang. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terpancang (*case study and embedded reaserch*) karena masalah dan tujuan penelitian telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal penelitian.

Tempat penelitian adalah Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta dengan pertimbangan yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana menyangkut biaya, waktu dan tenaga. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan penelitian akan disusun dan dilaksanakan secara sistematis, dari persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan dilaksanakan selama tiga bulan, yakni dari bulan April 2018 sampai Juli 2018.

Menurut Sudaryanto (dalam Mahsun, 2005: 18) data merupakan bahan penelitian, yaitu bahan jadi. Data dalam penelitian ini berupa peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018. Subjek dalam penelitian ini diantaranya Kepala Kelurahan, Ketua LPMK, Sekertaris Kelurahan, dan masyarakat di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interaktif yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2010:121), validitas atau keabsahan data adalah “alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data

(mengukur) valid”. Instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi metode atau teknik pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Menurut Gay sebagaimana dikutip oleh Iskandar (2012:74), analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada dua jenis yaitu model alir dan model interaktif. Penelitian ini menggunakan model interaktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran LPMK dalam Meningkatkan Sikap Demokratis Masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Tahun 2018

- 1) *LPMK memberikan kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat.* Salah satu peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 yaitu LPMK memberikan kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat. LPMK Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat kelurahan setempat untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di kelurahan.
- 2) *LPMK menghormati perbedaan pendapat.* Salah satu peran LPMK meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 yaitu LPMK merupakan pihak yang menghormati perbedaan pendapat. LPMK menyadari bahwa perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan alasan penghambat jalannya rapat, akantetapi LPMK harus siap dengan berbagai kemungkinan untuk mendamaikan warga yang saling berseteru. LPMK menjadi penengah dalam memberikan keputusan terbaik, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, LPMK juga memberikan

penjelasan terkait materi atau usulan yang diperdebatkan sehingga warga dapat menerima hasil keputusan dengan hati lapang.

- 3) *LPMK mampu memahami keanekaragaman dalam masyarakat.* Salah satu peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 yaitu LPMK mampu memahami keanekaragaman dalam masyarakat. LPMK menyadari penuh bahwa keanekaragaman masyarakat rentan menimbulkan konflik, terutama dalam situasi rembug kelurahan. Di sini LPMK harus bijak menanggapi perbedaan latar belakang dari masyarakat di Kelurahan Gilingan. LPMK berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat bahwa menunjukkan perbedaan tingkat sosial tidak menyelesaikan masalah. Sikap yang dilakukan oleh pihak LPMK ini mampu menjadikan masyarakat merasa tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan.
- 4) *LPMK sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan.* Salah satu peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 yaitu LPMK sebagai lembaga yang selalu menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan. LPMK memahami bahwa masing-masing warga memiliki potensi yang berbeda, sehingga hak dan kesempatan yang diberikan kepada mereka juga haruslah sama. Selain itu, menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan yang dilakukan oleh LPMK Kelurahan Gilingan dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran, terutama di dalam lingkup Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta.
- 5) *LPMK berperan sebagai lembaga yang senantiasa menghimbau masyarakat agar saling menghargai.* Peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 yaitu LPMK sebagai lembaga yang selalu menghimbau kepada masyarakat agar memiliki sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. LPMK juga menekankan bahwa dengan sikap saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan kepala kelurahan dimana kepentingan masyarakat kelurahan harus di utamakan. Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kepala Kelurahan yang selalu berpihak pada kepentingan Masyarakat Kelurahan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Zamroni (2001: 32), terkait nilai-nilai demokrasi meliputi , a) toleransi, b) kebebasan mengemukakan pendapat, c) menghormati perbedaan pendapat, d) memahami keanekaragaman dalam masyarakat, e) terbuka dalam komunikasi, f) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, g) percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain, h) saling menghargai, i) mampu mengekang diri, j) kebersamaan, dan k) keseimbangan.

3.2 Kendala yang Dialami oleh LPMK dalam Meningkatkan Sikap Demokratis Masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Tahun 2018

- 1) Kendala LPMK dalam memberikan kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Kendala yang menghambat peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 terkait memberikan kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat yaitu kinerja pemerintah desa yang kurang terbuka terhadap LPMK. Ketidakterbukaan ini terjadi karena pemerintah desa mengalami beda pendapat dengan LPMK, akibatnya pemerintah desa mengambil keputusan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Keputusan sepihak yang sudah diambil inilah yang menyebabkan LPMK tidak bisa lagi menyalurkan aspirasi masyarakat, atau lebih tepatnya tidak bisa membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpendapat sesuai dengan keinginannya. Ketidakterbukaan pemerintah kelurahan kepada LPMK juga dianggap sebagai kurangnya pemahaman dari pemerintah atas kedudukan LPMK di Kelurahan.
- 2) Kendala LPMK berperan dalam menanamkan sikap menghormati perbedaan pendapat. Kendala yang menghambat peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 terkait peran LPMK dalam menanamkan sikap

menghormati perbedaan pendapat yaitu masyarakat yang berpendidikan rendah. Masyarakat yang pendidikannya kurang akan menimbulkan proses sosialisasi dan komunikasi yang buruk. Ketika ada orang yang berbicara namun dia tidak tau bagaimana mengatur kata-kata, dari sinilah akan timbul masalah dalam masyarakat tersebut dan situasi yang tidak bisa terkontrol inilah yang menyulitkan LPMK dalam menghimbau kepada warga untuk saling menghormati perbedaan pendapat.

- 3) Kendala LPMK berperan dalam memahami keanekaragaman dalam masyarakat. Salah satu kendala yang menghambat peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 terkait peran LPMK dalam memahami keanekaragaman dalam masyarakat yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta. Masyarakat yang tidak pernah mau ikut berperan serta, tidak mau turut hadir dinilai menyebabkan LPMK susah dalam memahami macam-macam dari kebutuhan dan suara-suara atau keinginan mereka.
- 4) Kendala LPMK berperan sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan. Salah satu kendala yang menghambat peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 terkait peran LPMK sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan yaitu kurangnya pemahaman dari pemerintah atas kedudukan LPMK di Kelurahan. Pengambilan keputusan secara sepihak ini yang menyebabkan LPMK tidak memiliki kesempatan untuk memberikan hak kepada masyarakat sehingga perannya dalam menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan tidak terpenuhi.
- 5) Kendala LPMK berperan sebagai lembaga yang senantiasa menghimbau masyarakat agar saling menghargai. Kendala yang menghambat peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018 terkait peran LPMK sebagai lembaga yang senantiasa menghimbau masyarakat agar saling menghargai yaitu kesibukan anggota LPMK diluar aktivitasnya sebagai anggota

LPMK. Banyak yang memiliki pekerjaan sampingan, dan pemerintah desa juga tidak bisa melarangnya. Akan tetapi, masalah muncul ketika anggota BNPD tidak pandai mengatur waktu. Terlalu sibuk dengan pekerjaan sampingannya sehingga pekerjaan yang utama yaitu sebagai lembaga aspirasi masyarakat kurang maksimal. Berawal dari kurangnya intensitas pertemuan ini yang menyebabkan anggota LPMK tidak maksimal dalam berinteraksi dengan warga, akhirnya nasehat-nasehat, himbauan-himbauan juga tidak lagi diberikan atau kalaupun diberikan juga tidak maksimal, kurang sungguh-sungguh.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Winata (2016), terkait kendala yang dihadapi oleh LPMK Sungai Pagar Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar yang menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi LPMK Kelurahan Batusari dalam melaksanakan peran LPMK sebagai agen demokratisasi yaitu mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada LPMK, kurangnya pemahaman dari pemerintah atas kedudukan LPMK di Kelurahan Batusari, kesibukan anggota LPMK diluar aktivitasnya sebagai anggota LPMK, dan tidak adanya penghargaan kepada anggota LPMK (dana operasional yang tidak mencukupi) dan kemampuan SDM serta tidak adanya sumber dana yang dapat merangsang motivasi dan memberikan kesempatan pengurus LPMK untuk berkarya.

3.3 Solusi yang Dilakukan Guna Mengatasi Kendala yang Dihadapi oleh LPMK dalam Meningkatkan Sikap Demokratis Masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Tahun 2018

- 1) Solusi untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK dalam memberikan kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK dalam memberikan kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat yaitu mengadakan rapat koordinasi antara LPMK dengan pemerintah desa Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta. Tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi tersebut, pertama, untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintah desa dan LPMK, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

- 2) Solusi untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK menanamkan sikap menghormati perbedaan pendapat. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK menanamkan sikap menghormati perbedaan pendapat yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam setiap program pemerintah kelurahan. LPMK di Kelurahan Gilingan harus bekerja keras lagi memberikan himbauan kepada masyarakat, baik dalam pertemuan rutin, maupun mengadakan pertemuan di kampung, di rumah RT/RW guna memberikan penyuluhan dan himbauan agar masyarakat mau ikut berperan aktif dalam setiap program pembangunan yang diusulkan, baik dari warga setempat sendiri, maupun dari lembaga pemerintahan kelurahan.
- 3) Solusi untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK dalam memahami keanekaragaman dalam masyarakat. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK dalam memahami keanekaragaman dalam masyarakat yaitu melakukan diskusi atau pertemuan rutin dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat. Pertemuan rutin dengan masyarakat dinilai sangat penting dilakukan oleh LPMK. Dalam pertemuan yang kontinyu dan berkesinambungan, LPMK akan lebih dekat dengan masyarakat, lebih tahu apa yang menjadi uneg-uneg yang selama ini tidak bisa mereka sampaikan di dalam forum umum di balai Kelurahan.
- 4) Solusi untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan. Rapat yang dilakukan bertujuan untuk menyosialisasikan tugas dan fungsi kepala kelurahan dan anggota LPMK. Selain itu, tujuan rapat juga dimaksudkan untuk menyampaikan dan menyosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan program pembangunan desa. LPMK menginginkan agar pemerintahan kelurahan harus memahami bahwa LPMK memiliki kedudukan sama pentingnya dengan pemerintahan kelurahan.

- 5) Solusi untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK sebagai lembaga yang senantiasa menghimbau masyarakat agar saling menghargai. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat peran LPMK sebagai lembaga yang senantiasa menghimbau masyarakat agar saling menghargai adalah dengan cara mengubah jadwal pertemuan. Untuk mengatasi kesibukan anggota LPMK diadakan diskusi internal anggota LPMK yang pelaksanaannya pada malam hari karena di siang hari anggota LPMK sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Pengubahan jadwal rapat di malam hari juga bertujuan agar anggota LPMK memiliki banyak waktu untuk lebih memperhatikan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat kelurahan yang berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rompas (2015), terkait solusi yang dilakukan oleh Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah kelurahan, diskusi rutin atau pertemuan dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat, dan mengubah jadwal pertemuan LPMK.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut.

- 1) Peran LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018.
 - a) LPMK memberikan kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat
 - b) LPMK menghormati perbedaan pendapat
 - c) LPMK mampu memahami keanekaragaman dalam masyarakat
 - d) LPMK sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan

- e) LPMK berperan sebagai lembaga yang senantiasa menghimbau masyarakat agar saling menghargai.
- 2) Kendala yang dialami oleh LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018.
 - a) Kinerja pemerintahan desa yang kurang terbuka terhadap LPMK
 - b) Masyarakat yang berpendidikan rendah
 - c) Kurangnya partisipasi dari masyarakat di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta
 - d) Kurangnya pemahaman dari pemerintah atas kedudukan LPMK di kelurahan
 - e) Kesibukan anggota LPMK diluar aktivitasnya sebagai anggota LPMK.
- 3) Solusi yang dilakukan guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh LPMK dalam meningkatkan sikap demokratis masyarakat Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta tahun 2018.
 - a) Mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah kelurahan
 - b) Memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam setiap program pemerintah kelurahan
 - c) Melakukan diskusi atau pertemuan rutin dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat
 - d) Melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kelurahan
 - e) Mengubah jadwal pertemuan

4.2 Saran

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas dan wewenang LPMK dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada pemerintah kelurahan
 - a) Komunikasi antar pemerintah kelurahan dengan LPMK harus ditingkatkan lagi, agar tidak ada kesalahpahaman dan perselisihan yang berlarut-larut yang menjadikan pemerintah kelurahan mengambil keputusan sepihak.
 - b) Pemerintah kelurahan sebaiknya meningkatkan anggaran LPMK. Peningkatan anggaran ini dimaksudkan agar LPMK memiliki pendapatan

yang layak sehingga tidak banyak anggota LPMK yang mencari pekerjaan sampingan dan tidak mengabaikan tugas mereka.

2) Kepada LPMK

- a) LPMK diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada (mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada LPMK, kurangnya pemahaman dari pemerintah kelurahan atas kedudukan LPMK), sehingga dapat lebih mengoptimalkan perannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
- b) Anggota LPMK diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada tugas dan wewenangnya agar di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antar anggota LPMK dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik antar anggota.

3) Kepada masyarakat

Masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya peran aktif mereka dalam setiap program pembangunan di kelurahan. Kesadaran masyarakat sangat penting guna menunjang kinerja baik pemerintah kelurahan maupun lembaga LPMK.

4) Kepada peneliti berikutnya

- a) Bagi peneliti sebagai wawasan dan pengetahuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- b) Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu serta memberi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang sejenis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Iskandar. 2012. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Referensi.

Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tehniknya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Winata, Septiani Putri. 2016. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016”. *Skripsi S-1*. Riau: Universitas Riau.